



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Drs. Esib Jaelani, MH.
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 12740

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **949.000.000**

1. Tanah Seluas 4.900 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 21.500.000
2. Tanah Seluas 2.506 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 14.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/300 m2 di KAB / KOTA
PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 97.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 1.081 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 16.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **217.700.000**

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2007,
HASIL SENDIRI Rp. 950.000
2. MOTOR, HONDA NF1181D1MT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
1.750.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S MT Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 215.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **27.730.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	154.564.986
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.348.994.986
III. HUTANG	Rp.	14.367.522
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.334.627.464

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 ♦ informasi@pajak.go.id ♦
pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-14738/CT/KPP.0910/2026
Tanggal	: 19 Februari 2026
NPWP	: 3214010604670006
Nama Wajib Pajak	: DRS ESIB JAELANI MH
Jenis SPT	: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Januari - Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 19 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.